

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan salah satu bidang studi yang berfokus untuk mempelajari hubungan atau interaksi antarnegara di dunia. Sejak awal kemunculannya sebelum perang dunia pertama, hubungan internasional selalu fokus kepada isu-isu *high politics* atau isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan kenegaraan. Namun sejak berakhirnya perang dingin pada dekade 1990-an terjadi sebuah pergeseran pengkajian isu yang sebelumnya berfokus kepada isu-isu *high politics* menjadi lebih fokus kepada isu-isu *low politics* seperti misalnya isu ekonomi, sosial, lingkungan, hak asasi manusia dan terorisme (Perwita & Yani, 2005).

Pergeseran pengkajian isu tersebut mengakibatkan meningkatnya pembahasan mengenai isu-isu *low politics* seperti misalnya keamanan manusia yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics*. Dalam hal keamanan manusia (*Human Security*), konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu fokus bahasan utama. HAM sendiri secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu atau manusia sehingga mereka harus diakui eksistensinya tanpa membedakan berdasarkan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan serta kelahiran (*Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, artikel 1 dan 2). HAM sendiri kini menjadi salah satu isu yang paling diperhatikan dan dibahas di dalam hubungan internasional era kontemporer.

Salah satu fenomena berkaitan dengan HAM yang banyak terjadi serta mengundang perhatian dunia internasional ialah pekerja anak. Pada dasarnya partisipasi anak dalam beberapa pekerjaan tertentu akan berdampak baik terhadap pertumbuhan sang anak, namun hal tersebut tentunya tidak boleh berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan dan perkembangan pribadi anak tersebut. Namun pada kenyataannya, fenomena global yang terjadi melibatkan anak-anak pada situasi kerja yang berbahaya serta menyertakan unsur eksploitasi. Anak-anak bekerja seperti halnya orang dewasa yang membutuhkan tanggung jawab serta tenaga berlebihan yang dilakukan hampir setiap hari sehingga hal tersebut berdampak buruk pada perkembangan fisik maupun mental serta mengganggu jam sekolah sehingga akses anak untuk mendapatkan pendidikan menjadi terbatas (International Labour Organization, 2021).

Berdasarkan konvensi yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) yaitu Konvensi Usia Minimum No.138 Tahun 1973, menyatakan bahwasanya pekerja anak adalah seorang anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari di mana usianya tidak lebih dari 15 tahun. Di mana pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang mengganggu atau menghalangi masa kecil, potensi, martabat serta berbahaya terhadap mental, fisik, sosial dan moral anak tersebut (ILO, 2021).

Pada laporan tahunan terakhir yang dikeluarkan oleh ILO berjudul *Child Labor: Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward*, menyatakan bahwasanya pada tahun 2020 angka pekerja anak global diperkirakan mencapai lebih dari 160 juta anak yang terdiri dari 97 juta pekerja anak laki-laki dan 63 juta pekerja anak perempuan di mana angka tersebut mewakili 1 dari 10 anak di seluruh

dunia. Angka tersebut tentunya juga menimbulkan kekhawatiran dikarenakan untuk pertama kalinya sejak tahun 2000, dunia tidak mengalami kemajuan melainkan kemunduran yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja anak sekitar 8 juta anak selama 4 tahun terakhir, di mana sekitar 79 juta dari pekerja anak tersebut berada pada kategori kondisi ‘*Hazardous Child Labour*’ atau melakukan pekerjaan berbahaya (UNICEF, 2021).

Secara khusus, berdasarkan bidang industri, pekerja anak secara mayoritas bekerja pada sektor agrikultur (sekitar 70,9% dari total pekerja anak), lalu hampir seperlima pekerja anak bekerja di sektor Layanan dan Jasa (sekitar 17,1% dari total pekerja anak) dan 11,9% pekerja anak bekerja pada sektor industri lainnya. Afrika menjadi benua dengan konsentrasi pekerja anak tertinggi di dunia, yaitu sekitar 73 juta pekerja anak diikuti oleh wilayah Asia Pasifik dengan lebih dari 62,1 juta pekerja anak. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat prevalensi pekerja anak global masih tinggi, meskipun beberapa negara telah kerap berupaya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerja anak (ILO, 2017b).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa fenomena pekerja anak masih banyak terjadi di dunia. Secara umum, kemiskinan menjadi faktor utama penyebab terjadinya fenomena pekerja anak di banyak negara. Keluarga yang berada dalam garis kemiskinan biasanya mengirim anak mereka bekerja untuk mendapatkan pendapatan lebih guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terdapat tradisi yang menormalisasi fenomena pekerja anak. Kemudian di beberapa negara yang sedang berkembang, anak-anak seringkali menjadi objek eksploitasi sebagai tenaga kerja yang murah, ditambah dengan akses pendidikan serta perlindungan secara konstitusi yang tidak memadai, membuat banyak anak jatuh

kedalam pasar tenaga kerja sebelum usia produktif mereka. Selain itu diskriminasi serta konflik juga turut menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena pekerja anak di banyak negara (ILO, 2015a).

Salah satu negara di dunia yang masih mengalami fenomena pekerja anak ialah Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara tepatnya di wilayah semenanjung Indochina, Vietnam sendiri berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Laos, Kamboja dan China. Dengan lebih dari 100 juta penduduk pada tahun 2022, kini Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (BBC.com, 2023). Menurut data yang didapat dari survei nasional pekerja anak di Vietnam tahun 2018, Vietnam memiliki sekitar 1 juta pekerja anak, angka tersebut mewakili sekitar 5,4% dari total anak-anak di Vietnam. Mayoritas pekerja anak tersebut atau sekitar 84% tinggal di wilayah pedesaan dan hanya sekitar 16% yang tinggal di perkotaan. Lebih dari 500 ribu anak tersebut bekerja pada sektor agrikultur atau sekitar 53,6% dari total pekerja anak yang ada (ILO, 2020b).

Data selanjutnya menunjukkan hampir dari setengah atau sekitar 48,6% dari total pekerja anak tersebut telah putus sekolah, hanya sekitar setengah atau 50% dari pekerja anak yang masih bersekolah, sedangkan 1,4% lainnya sama sekali belum pernah sekolah. Para pekerja anak tersebut juga harus melalui lebih dari 12 jam bahkan hingga 16 jam per hari untuk bekerja, atau sama dengan rata-rata 42 jam kerja per minggu. Para pekerja anak tersebut juga harus menghadapi keadaan untuk bekerja pada situasi yang berbahaya serta di bayar dengan upah yang sedikit. Sebagai contoh, rata-rata pekerja anak di restoran hanya di bayar sekitar 1,8 sampai

2 juta Dong Vietnam perbulannya atau kurang dari US\$90 perbulan (Hoang & Nguyen, 2020).

Penyebab utama dari masih terjadinya fenomena pekerja anak di Vietnam ialah sebagian besar dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi serta rendahnya kesadaran orang tua mengenai efek dan pengaruh buruk yang akan menimpa anak saat bekerja. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kebutuhan akan tenaga kerja yang murah juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya pekerja anak di Vietnam. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab menyembunyikan fakta pekerja anak dengan membuat bisnis di tempat-tempat terpencil. Hal tersebut tentunya akan membawa pengaruh buruk bagi perkembangan fisik dan mental sang anak. Serta dalam jangka panjang akan memengaruhi masa depan anak tersebut, dikarenakan mayoritas dari pekerja anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi produktif mereka. Dalam kata lain, fenomena pekerja anak membuat banyak anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan usia mereka, situasi ini juga memperbesar risiko eksploitasi, perdagangan manusia, pelanggaran ham dan kekerasan yang akan menimpa para pekerja anak (Hoang & Nguyen, 2020).

Vietnam sendiri telah melakukan beberapa upaya guna mencegah serta mengurangi angka pekerja anak yang ada. Usaha penyempurnaan undang-undang serta kebijakan yang berkaitan dengan masalah pekerja anak sudah dilakukan. Sekaligus pemerintah Vietnam mengeluarkan berbagai program dari tingkat pusat ke tingkat daerah yang mencakupi kerja sama dengan berbagai aktor lain seperti organisasi serta kelompok masyarakat sipil. Vietnam juga menjadi negara pertama

di Asia dan kedua di dunia yang meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak anak pada tahun 1990. Sekaligus Vietnam juga meratifikasi konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) seperti misalnya Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai Usia minimum pekerja (ILO, 2022d).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan Vietnam guna menyelesaikan masalah yang ada, namun nyatanya masih terdapat fenomena pekerja anak yang terjadi di negara tersebut, sehingga hal itu mengundang perhatian dari *International Labour Organization* (ILO). Vietnam sendiri telah menjadi anggota ILO sejak tahun 1992 dan telah meratifikasi 25 Konvensi buruh Internasional. Pada tahun 2003, ILO membuka kantor cabang pertamanya di Vietnam yang terletak di Kota Hanoi. Tujuan utama ILO di Vietnam sendiri ialah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang isu-isu terkait pekerjaan (ILO, 2016).

ILO telah mengeluarkan berbagai program dan proyek dalam upaya pemenuhan tujuan utama tersebut, salah satunya ialah program DWCP atau *Decent Work Country Programmes*, melalui program DWCP tersebut ILO berusaha membentuk sebuah kerangka kerja sama dengan pemerintah Vietnam serta organisasi dan serikat buruh di sana guna memperjuangkan beberapa prioritas seperti diantaranya: Mempromosikan pekerjaan yang layak serta ramah lingkungan, mengurangi kemiskinan dengan memperluas perlindungan sosial dan

membangun tata kelola pasar tenaga kerja yang efektif sesuai dengan prinsip dan hak fundamental di tempat kerja (ILO, 2021b).

Sedangkan untuk mengatasi pekerja anak di Vietnam, pada tahun 2015, ILO mengeluarkan sebuah proyek bernama ENHANCE *project* atau *Technical Support for Enhancing the National Capacity to Prevent and Reduce Child Labour in Vietnam*. Proyek ENHANCE sendiri merupakan upaya ILO yang juga mendapatkan dukungan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL), dalam memberikan dukungan serta bantuan bagi Vietnam dalam mengatasi permasalahan serta fenomena pekerja anak. Tujuan utama dari proyek ENHANCE sendiri ialah untuk menguatkan kapasitas bagi lembaga serta berbagai pemangku kebijakan di Vietnam dalam mencegah serta meminimalisir pekerja anak secara efektif dan efisien (ILO, 2022d).

Pada tahap pertama, proyek ENHANCE berjalan dari tahun 2015 hingga 2020 dan telah mendapatkan pendanaan sebesar US\$8 juta dari Biro Urusan Perburuhan Internasional yang berada langsung di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL). Selain itu pemerintah Vietnam juga memberikan bantuan dana sebesar US\$1.2 juta, sehingga pada awal berjalannya proyek di tahun 2015, sudah terkumpul dana sebesar US\$9.2 juta. Selain itu dalam perjalanannya, ILO bekerja sama dengan berbagai pihak seperti misalnya pemerintah Vietnam yang diwakili oleh MOLISA (*Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs*) atau Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial Vietnam, organisasi pekerja, serikat buruh dan lembaga riset dalam menjalankan proyek ENHANCE bagi mengatasi permasalahan pekerja anak di Vietnam, terutama para pekerja anak di sektor-sektor seperti Garmen, Agrikultur, perikanan dan kerajinan (Wark, 2021).

Melihat penjelasan mengenai latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Penulis tertarik untuk membahas serta mengetahui lebih lanjut kontribusi serta upaya apa saja yang dilakukan oleh ILO dalam proyek ENHANCE di Vietnam. Sehingga penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“KONTRIBUSI ILO MELALUI PROYEK *ENHANCING NATIONAL CAPACITY TO PREVENT AND REDUCE CHILD LABOUR IN VIETNAM* (ENHANCE) DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI VIETNAM”**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi proyek *Enhancing National Capacity to Prevent and Reduce Child Labour in Vietnam* (ENHANCE) oleh ILO dalam meminimalisir pekerja anak di Vietnam?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Dalam hal ini, penulis membuat batasan masalah. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana upaya ILO melalui proyek ENHANCE dapat berkontribusi bagi mengatasi permasalahan serta meminimalisir pekerja anak di Vietnam.

Batasan waktu digunakan untuk membatasi rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya tulis ilmiah ini agar tidak melebar jauh dari topik utama. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah pada tahun 2018-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru, serta menetapkan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah dan kontribusi ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak.
2. Untuk mengetahui kondisi para pekerja anak di Vietnam.
3. Untuk mengetahui kontribusi ILO melalui proyek ENHANCE dalam mengatasi masalah serta meminimalisir pekerja anak di Vietnam.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara khusus memberikan informasi kepada para pembaca mengenai peranan dari suatu organisasi internasional, seperti ILO contohnya dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Vietnam.
2. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung.